

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA  
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**N a m a : MUTIARA PERTIWI HASIBUAN**

**N P M : 1305170112**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**MUTIARA PERTIWI HASIBUAN. 1305170112. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tingkat Kemandirian daerah, Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data yang digunakan berupa data sekunder (Data Laporan Realisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari tingkat kemandirian rata-rata dari tahun 2011-2015 berada pada kisaran 0%-25% sebesar 16,81% rasio tersebut menunjukkan pola instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah, sehingga daerah yang bersangkutan dikatakan kurang mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Tingkat Efektifitas daerah secara rata-rata dari tahun 2011-2015 dapat dikatakan kurang efektif yaitu berada pada kisaran 75%-89% sebesar 85,05%. Rata-rata Pertumbuhan Asli Daerah dari tahun 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif namun mengalami penurunan mulai dari tahun 2013 dengan rata-rata sebesar 17,04%.

**Kata Kunci:** *Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah... segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa keluarga penulis. Kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Wahyudianto dan Ibunda tercinta Sugiarti yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis. Tidak lupa juga kakak-kakak penulis, Pradita Atmasari dan Windi Aryuni serta abang

penulis Heru Pratomo Putra yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak DR. Agussani M, AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas Akuntansi B-Pagi Stambuk 2013 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam segala urusan akademik.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Staf Biro Akuntansi yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan birokrasi.
10. Bapak Acai Tagor Sijabat, AP, M.Si, Selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

11. Ibu Hj. Masni SH, Selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
12. Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah PEMKO Pematangsiantar ,Kak Ayu, Kak dina dan Bang Erik yang telah membantu penulis dalam Administrasi Kelengkapan Skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi B-Pagi Stambuk 2013 yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis dari awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi F-Malam Stambuk 2013 yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
15. Seluruh kader-kader PMB FEB, PMB FKIP, PMB FAHUM, PMB FAPERTA.
16. Kak Kiki Rizki Ana Pohan yang sudah penulis anggap seperti kakak sendiri, yang telah banyak memberikan ilmunya, motivasi dan semangat kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat saya Ira Irianto Dalimunthe, Mindo Astika Putri, Eky Sartika Sinaga, Reni Mastura, Retno Putri Lestari, Diah Ismaya Karo-karo dan Mutiara Pertiwi Hasibuan yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
18. Seseorang yang spesial Mulia Parlindungan Rambe, S.E yang selalu memotivasi, mensupport, memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya serta mendapat keridha'an Allah SWT.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Medan, April 2017

Penulis

**Agustina Vidi Rahayu**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Kinerja.....	8
2. Kinerja Keuangan Daerah .....	8
3. Penilaian Kinerja.....	9
4. Analisis Rasio Keuangan .....	15
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	17
6. Pendapatan Daerah.....	19
7. Belanja Daerah .....	20
8. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kerangka Berpikir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	26
B. Definisi Operasional Variabel.....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .....	31
2. Deskriptif Data pada Analisis Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .....	34
B. Pembahasan.....	40
1. Kinerja Keuangan Dinilai Dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	40
2. Kinerja Keuangan Dinilai Dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	41
3. Kinerja Keuangan Dinilai Dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	42
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	44
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	4
Tabel I.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	5
Tabel II.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	21
Tabel II.2	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas.....	22
Tabel II.3	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien .....	23
Tabel II.4	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
Tabel III.2	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas .....	33
Tabel III.3	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien.....	34
Tabel III.4	Waktu Penelitian .....	36
Tabel IV.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	39
Tabel IV.2	Komponen Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	41
Tabel IV.3	Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	42
Tabel IV.4	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	44

Tabel IV.5	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	46
Tabel IV.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	48
Tabel IV.7	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	49
Tabel IV.8	Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	29
-------------	-------------------------	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan .....	40
Grafik 2	Kemandirian Keuangan Daerah.....	43
Grafik 3	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	45
Grafik 4	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	47
Grafik 5	Anggaran dan Realisasi Belanja .....	48
Grafik 6	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.....	50
Grafik 7	Belanja Operasi dan Belanja Modal .....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda Pemerintahan Daerah, pambantuan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah akan dapat maju apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi dan penerapan keuangan yang benar.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas harus mampu menjalankan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Dalam melaksanakan akuntabilitasnya masyarakat perlu melakukan penilaian kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peranturan perundang-undangan dalam menjalankan akuntabilitas dan menghasilkan pelayanan publik dengan cara mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien maupun ekonomi. Pemerintah

Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun non financial (Uhyaul Ulum, 2012: 20)

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain (1) pengukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. (2) Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. (3) Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam menilai kinerja daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Menurut (Halim 2012) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-

proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim 2013).

Alat yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan pemerintah yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, ketergantungan fiskal dan derajat desentralisasi fiskal (Mahmud, 2007) dan Abdul Halim menyatakan rasio keuangan yang dapat dilakukan meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, Debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan.

Penilaian Kinerja keuangan berbasis Anggaran dan Realisasi untuk memaksimalkan selisih antara Pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini adalah Anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu.

**Tabel I.1**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>%</b>
2011	Rp.2.050.890.350.987	Rp.1.853.853.020.694	Rp.1.853.853.020.694	90,39%
2012	Rp.3.936.284.359.169	Rp.3.678.600.859.086	Rp.3.678.600.859.086	93,45%
2013	Rp.2.241.532.091.246	Rp.2.096.336.037.545	Rp.2.096.336.037.545	93,59%
2014	Rp.4.720.559.458.710	Rp.4.111.610.798.729	Rp.4.111.610.798.729	87,10%
2015	Rp.4.216.712.549.621	Rp.4.471.210.634.770	Rp.4.471.210.634.770	106,01%

Adapun fenomena yang dapat terlihat dari hasil perhitungan pada tabel diatas bahwa dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami surplus dimana realisasi pendapatan asli daerah belum melampaui jumlah target PAD. Dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan atau pencapaian target yaitu jumlah realisasi melampaui target anggaran yaitu lebih dari 100%.

Menurut Halim (2013: 20) Analisis terhadap kinerja keuangan daerah secara umum terlihat dari pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggarannya (Target) maka kinerja akan dikatakan baik. Penilaian kinerja anggaran akan dapat lebih baik jika di ukur menggunakan analisis rasio kinerja keuangan yang akan digunakan pada pemerintahan daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) Menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah (Halim,dalam ihyaul ulum).

Untuk tingkat efektivitas dari tabel di atas dapat terlihat bahwa rasio ini Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas di kategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (100%). Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Pertumbuhan di nilai baik bila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang

negative maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan. (Halim,2012).

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah, maka penulis mengambil judul yaitu **“Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah tahun 2011-2014 belum mencapai target (anggaran).

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang terkait dengan kinerja keuangan daerah. Pada Kemendagri terdapat 6 rasio dalam menilai kinerja keuangan akan tetapi peneliti hanya menggunakan 3 rasio karena keterbatasan data yang dimiliki pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah..

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio kemandirian pada tahun anggaran 2011-2015 ?
- b. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efektivitas pada tahun anggaran 2011-2015 ?
- c. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2011-2015 ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi hasil kinerja keuangan daerah dan mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan pada tahun 2011-2015.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu :

- a. Bagi Penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya. Serta menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah. pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah

c. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Kinerja**

Menurut Sedarmayanti dalam Nurlia Hafni (2015) mengemukakan bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dan performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa kinerja juga bisa didefinisikan sebagai fokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome. misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan (Ningsih. Dalam Ulum 2012).

##### **2. Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012: 24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan. dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pernerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya

pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

### **3. Penilaian Kinerja**

#### **a. Pengertian Penilaian Kinerja**

Penilaian adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk, menentukan nilai kuantitatif sesuatu objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, sedangkan penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses. Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi. Dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh

masyarakat luas. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

#### **b. Tujuan Penilaian Kinerja**

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2009: 21).

#### **c. Manfaat Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
5. Membantu mernaharni proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambil alihan keputusan dilakukan secara objektif (Ulum. 2009: 22)

#### **d. Informasi yang Digunakan dalam Penilaian Kinerja**

##### **1. Informasi Finansial**

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. dimana pengukuran dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada:

##### **a. Varian Pendapatan**

Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dan berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu:

##### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:**

##### **a) Pajak daerah**

Pajak daerah adalah semua pendapatan daerah yang berasal dan sumber ekonomi ash daerah atau pajak. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. pajak reklame. pajak penerangan jalan, pajak parkir.

##### **b) Restribusi daerah**

Restribusi daerah adalah pendapatan yang berasal dan restribusi dan daerah. yang meliputi restribusi pelayanan kesehatan, restribusi air. restribusi pertokoan. retribusi kelebihan muatan dan sebagainya.

c) Bagian laba usaha daerah

Bagian laba usaha daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dan lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dan penjualan oleh daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dan penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana perimbangan terdiri atas.

a) Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dan pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi hasil yang bersumber dan sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dan anggaran pendapatan negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dan alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dan pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara provinsi, kabupaten dan kota.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu (Abdul Halim, 2004: 65). Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khususnya yang merupakan unsur daerah Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

d) Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah (bantuan yang tidak mengikat dan pendapatan dana darurat).

b. Varian Pengeluaran

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari:

### 1) Varian belanja rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar, rutin dan secara terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja rutin yang diusulkan oleh setiap penganggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. Anggaran belanja rutin meliputi belanja APBD, belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah dan perangkat lainnya.

### 2) Varian belanja pembangunan.

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya.

### 2) Informasi non finansial

Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas kerja manajemen, informasi non finansial biasanya digunakan dalam pengukuran

kinerja dengan menggunakan balanced scorecard .Mardiasno. Informasi non finansial dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan. Lingkungan eksternal dan internal. perbelajaran dan pertumbuhan serta non finansial (dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau sering disebut dengan key success faktor). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi (Iyaul Ulum. 2007: 279).

#### **4. Analisis Rasio Keuangan**

Menurut (Halim 2012) Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dan anggaran pendapatan belanja daerah yaitu:

##### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Halim (2012) Menyatakan bahwa kemandirian Keuangan daerah di tunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) di bandingkan dengan bantuan pusat atau dari Pemerintahan (pinjaman).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dan sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan tabel berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel II.1**  
**Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (0%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:169)

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nilai daerah, (Pramono,2014:23). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$R. \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar Potensi Rill Daeah}} \times 100\%$$

**Tabel II.2**  
**Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (0%)</b>
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

Sumber: Mashun (2009:187)

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan rneningkatkan keberhasilan yang dicapai dan periode ke periode berikutnya (Halim,2012 dalam Pramono,2014:26|). Rasio pertumbuhan dikatakan baik. jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. (Halim, 2013).

$$RP = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100$$

Keterangan:

PADt1 – PADt0 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

PADt0 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

## 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut (Halim 2012) APBD dapat didefenisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda. dimana pada satu pihak menggarharkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proekprovek daerah selama satu tahun anggaran tertentu. dan dipihak lain menggambarkan perkiraar dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah. 1995: 20 dalam Halirn. 2013)

Menurut (Deddi Noordiawan, dkk 2007: 39) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi otorisasi, yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- 1) Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- 2) Fungsi pengawasan, yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Fungsi alokasi, yang berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan pemborosan defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

### **6. Pendapatan Daerah**

Menurut (Deddi Nordiawan.dkk 2007:179) Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia. pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### a. Klasifikasi Pendapatan

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual, pp 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan

berdasarkan tempat terjadinya (apakah dipusat atau didaerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

1) Pendapatan pemerintah pusat:

- a) Pendapatan Perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan non migas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak pungutan ekspor.
- b) Pendapatan negara bukan pajak. merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPL lainnya.
- c) Pendapatan hibah.

2) pendapatan pemda

- a) Pendapatan asli daerah. merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- b) Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana penimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.

- c) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah hibah, dana darurat dan pemerintah dalam rangka penanggungjawaban bencana, bagi hasil pajak dan pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dan provinsi atau pemda lainnya.

## **7. Belanja Daerah**

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum Negara daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

### **a. Klasifikasi**

Berdasarkan PP 24 tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, barang modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi berdasarkan organisasi adalah organisasi pengguna anggaran. Untuk pemda, sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, provinsi/ kota/kabupaten dan lembaga provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti terangkum pada tabel berikut ini:

**Tabel II.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Astriana Nabila Muhibtari (2014)	Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota magelang tahun anggaran 2008-2012	Kinerja keuangan pemerintah daerah kota magelang yang masih kurang adalah di aspek kemandirian. Tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan dana sudah efektif dan efisien
2	Dori Sahputra (2014)	Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat	1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dan tahun 2014-2011. 2) Rasio efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109.8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116.2% dari tahun 2005-2011
3	Nurlia hafni (2015)	Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah	1) Rasio kemandirian masih relatif rendah sekali berdasarkan

		daerah kabupaten labuhan batu tahun anggaran 2011-2013	kriteria penilaian kemandirian daerah karena berada pada interval 0.25%. 2) Rasio efektivitas tahun 2011-2013 masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibanding belanja pembangunan 3) Pertumbuhan PAD pada tahun 2011-2013 menunjukkan kinerja Pemkab labuhan batu tidak baik. 4) Rasio efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan masih sangat efektif dan efisien.
4	Sri Wahyuni Darlis (2015)	Analisis kemandirian daerah efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam mengukur kinerja keuangan kota medan	1) Rasio kemandirian keuangan daerah kota medan sudah masuk dalam kriteria sedang. 2) Rasio efektivitas Pemkot Medan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan realisasi PAD sedangkan rasio efisiensi sudah sangat efisien dalam mengeluarkan biaya pemungutan PAD dalam merealisasikan PAD yang diteriam. 3) Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah positif namun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 62.17% mulai dari tahun 2011 sebesar 62.17% mulai dari tahun 2012 terus mengalami penurunan.

## **B. Kerangka Berpikir**

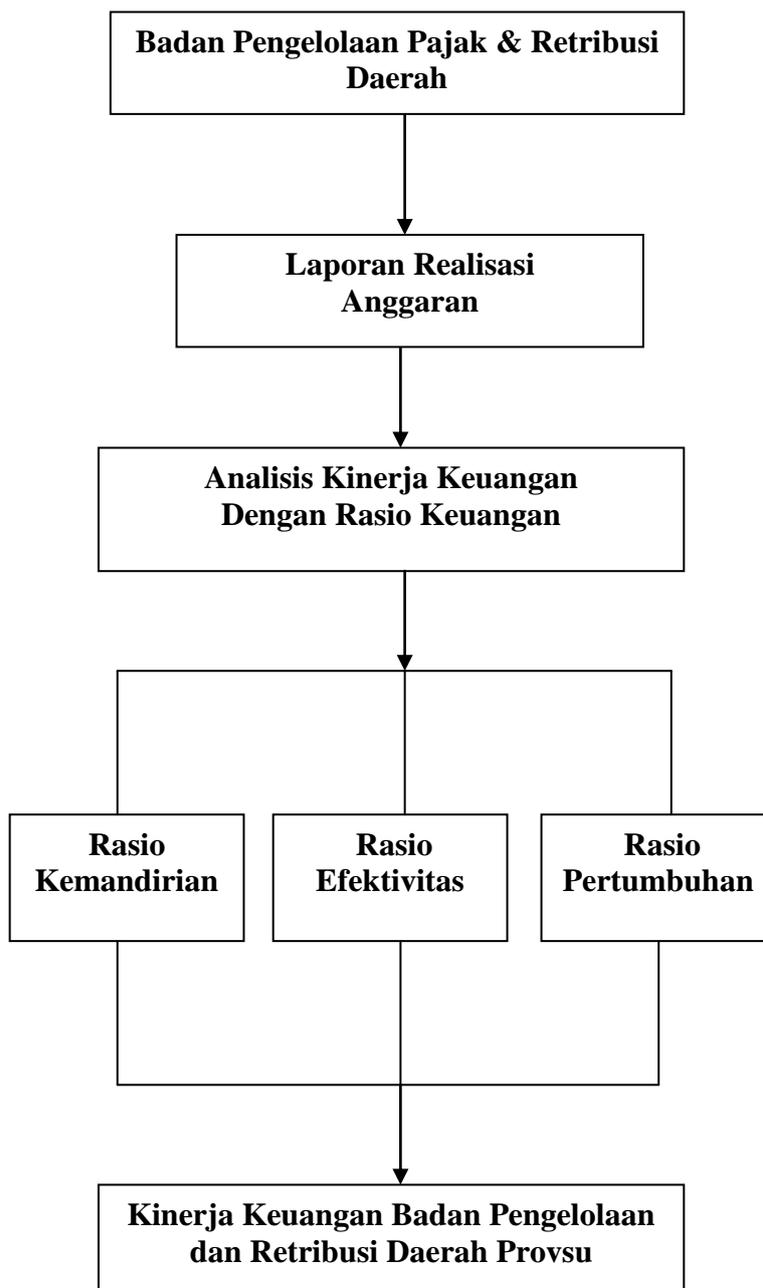
Kerangka berpikir merupakan penjelasan ilmiah mengenai preposisi antar konsep atau pertautan/hubungan antarvariabel penelitian. Ini sangat penting dikarenakan sebagai landasan untuk merumuskan masalah.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu. Adapun laporan keuangan yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan data Laporan Realisasi anggaran. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang memyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam per periode.

Dimana untuk membantu dalam menganalisis kinerja keuangan daerah harus menggunakan rasio keuangan. Karena hasil dari analisis kinerja keuangan merupakan penentuan hasil kinerja pada pemda dalam merealisasikan anggarannya. Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan dan peneliti menggunakan 3 rasio yaitu rasio kemandirian daerah yang merupakan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan yang dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan. Dan yang terakhir rasio pertumbuhan Pendapatan asli Daerah yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di capai dari satu periode ke periode berikutnya. Maka dapat di nilai kinerja keuangan secara umum, jika kinerja keuangan mencapai hasil angka sesuai target Pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan kinerja

keuangannya baik. Tetapi jika tidak mencapai hasil maka kinerja keuangan Pendapatan asli daerah belum mencapai target. Berikut ini adalah kerangka berpikir peneliti.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menetapkan pengukuran terhadap variabel-variabel yang akan diamati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah.

1. Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dengan sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur kemandirian daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah mengacu pada keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900.327 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Persentase Kemandirian</b>	<b>Kriteria Kemandirian Daerah</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0-25%	Rendah sekali	Instruktif
25-50%	Rendah	Konsultatif
50-75%	Sedang	Partisipatif
75-100%	Tinggi	Deligatif

2. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ yang\ ditetapkan\ Berdasarkan\ Potensi\ Riil\ Daerah} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Abdul Halim, 2012). Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas**

<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas (0%)</b>
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Ihyaul Ulum, 2012: 33). Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$Rp = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100$$

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di jalan Serbaguna No.10 Brayan Helvetia Medan.

#### **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2017 dan berakhir pada bulan April 2017 dengan rincian tabel dibawah ini :

**TABEL III.3**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Desember			Januari			Februari			Maret			April		
1	Pengajuan Judul	■	■													
2	Pra Riset			■	■											
3	Penyusunan Proposal				■	■	■									
4	Penyelesaian Proposal							■	■	■						
5	Seminar Proposal							■	■	■	■	■	■			
6	Pengumpulan Data												■	■		
7	Pengolahan Data														■	
8	Sidang Meja Hijau															■

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif dalam bentuk angka antara lain data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

##### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran yang bersumber dari arsip Badan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah provsu Tahun 2011-2015.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Berikut adalah tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan data yang di gunakan sebagai acuan penelitian yaitu laporan realisasi APBD.
2. Mengkaji dan menganalisis data laporan realisasi APBD.
3. Memperhatikan nilai pendapatan asli daerah maupun belanja daerah.
4. Menghitung rasio-rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi, Abdul Halim dan Kepmendagri 690.900.327.
5. Membandingkan rasio yang diperoleh dengan kriteria rasio yang telah ditetapkan.
6. Melalui perbandingan dapat diketahui kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Pada umumnya urusan pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) Sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindak lanjut surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah tingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah.

Selanjutnya melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II seluruh Indonesia, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Pembentukan dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976). Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Perda) No.3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dispendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai Pengelola utama sumber Pendapatan Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Dengan peran yang strategis ini, Dispendasu diuntut untuk:

Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan. Mampu mewujudkan pelayanan prima dalam melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi serta mampu mengoptimalkan kewenangan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan.

Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelola Pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu pengelola utama pendapatan daerah, adapun wilayah kerja Dispendasu meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 28 Daerah otonom tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai upaya mengantisipasi luasnya wilayah pengelolaan, Pemprovsum telah membentuk UPTD-UPTD yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan pemekaran sehingga sampai saat ini telah dibentuk 16 UPTD/Samsat termasuk Samsat dan ditambah 2 Samsat pembantu.

## 2. Deskripsi Data

Yang dimaksud dengan mendeskriptifkan data adalah menggambarkan yang diperoleh dalam bentuk nyata dari responden. Data ini menggunakan data Kuantitatif yang cara mendeskripsikannya menggunakan statistika. Tujuannya agar data lebih ringkas dan mudah dimengerti. Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat diapaparkan secara baik dan mudah terbaca. Tabel frekuensi merupakan cara penyajian paling umum dalam deskriptif data yang sering ditampilkan yaitu dalam bentuk diagram batang atau histogram. Data yang digunakan peneliti adalah data deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peranturan perundang-undangan dalam menjalankan akuntabilitas dan menghasilkan pelayanan publik dengan cara mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien maupun ekonomi.

Dalam menilai kinerja daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

### **3. Analisis Data**

#### **a. Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

##### **Provinsi Sumatera Utara 2011-2015**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah nya sepenuhnya tidak bergantung kepada pemerintahan pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang di tentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengukuran kinerja keuangan pemerintahan berdasarkan data realisasi APBD tahun 2011-2015 dengan melihat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan dan analisis surplus dan pembiayaan daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai hasil yang telah di tergetkan pada saat perencanaan. Dengan pengukuran kinerja juga merupakan cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah, membantu pejabat pemerintahan daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu masyarakat mengevaluasi tingkat pelayanan pemerintahan serta dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Dalam mengukur kinerja keuangan di perlukan alat ukur yaitu rasio keungan, dan dalam penelitian ini di gunakan 3 rasio untuk mengukurnya

yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian Keuangan daerah di tunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) di bandingkan dengan bantuan pusat atau dari Pemerintahan (pinjaman).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dan sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian keuangan daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini :

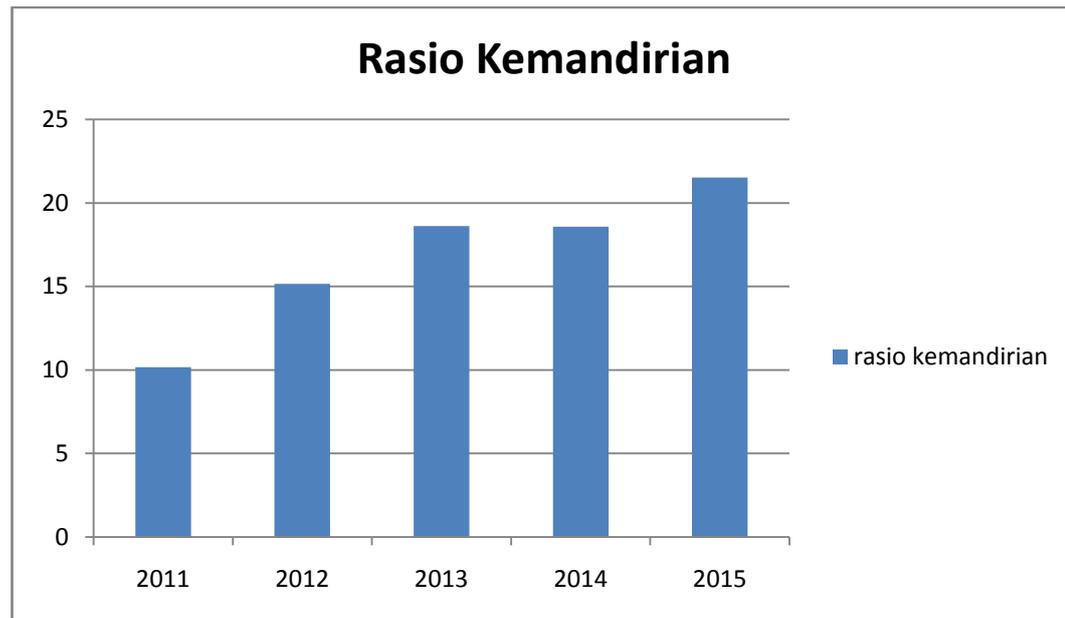
Table IV-1

**Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi Sumatra utara tahun 2011 – 2015**

Tahun	PAD (a)	Bantuan Pemerintahan Pusat/Provinsi dan Pinjaman (b)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2011	Rp.2.050.890.350.987	Rp.1.853.853.020.694	10,16	Instruktif
2012	Rp.3.936.284.359.169	Rp.3.678.600.859.086	15,16	Instruktif
2013	Rp.2.241.532.091.246	Rp.2.096.336.037.545	18,62	Instruktif
2014	Rp.4.720.559.458.710	Rp.4.111.610.798.729	18,57	Instruktif
2015	Rp.4.216.712.549.621	Rp.4.471.210.634.770	21,52	Instruktif
Rata-rata			16,81	Instruktif

Berikut ini adalah grafik rasio kemandirian keuangan daerah Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah :



#### b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

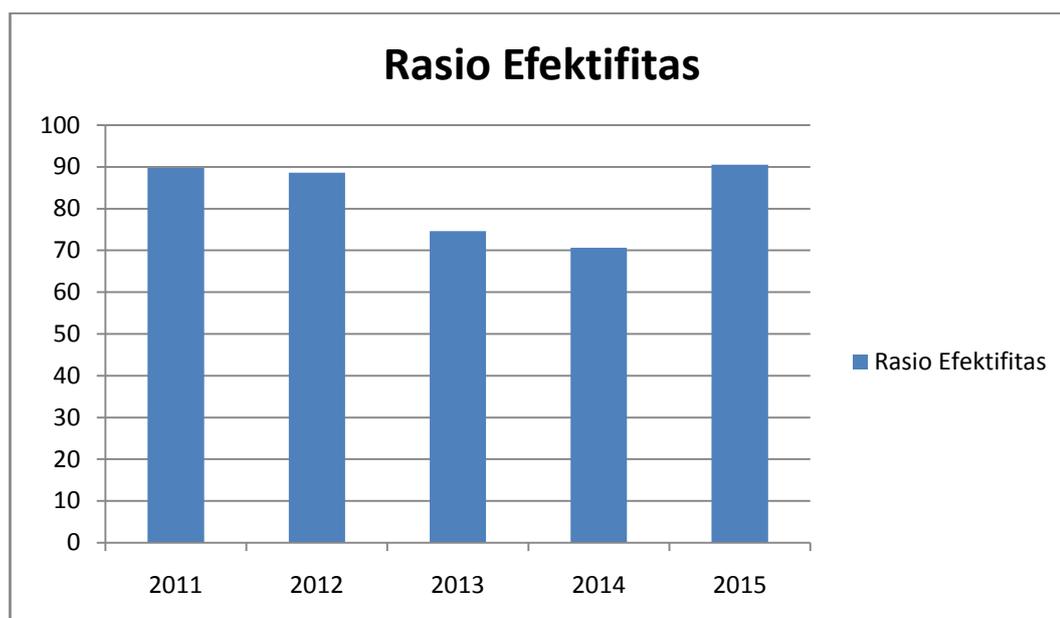
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nilai daerah, (Pramono,2014:23). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV-2**  
**Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (a)	Target Penerimaan PAD (b)	Rasio Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas
2011	Rp.2.050.890.350.987	Rp.2.241.532.091.246	89,76	Kurang efektif
2012	Rp.3.936.284.359.169	Rp.2.241.532.091.246	88,63	Kurang efektif
2013	Rp.2.241.532.091.246	Rp.4.720.559.458.710	74,61	Tidak efektif
2014	Rp.4.720.559.458.710	Rp.3.936.284.359.169	70,61	Tidak efektif
2015	Rp.4.216.712.549.621	Rp.4.987.241.667.345	90,55	Cukup efektif
Rata-rata			85,05	Kurang efektif

Berikut ini adalah grafik efektifitas Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara :



c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

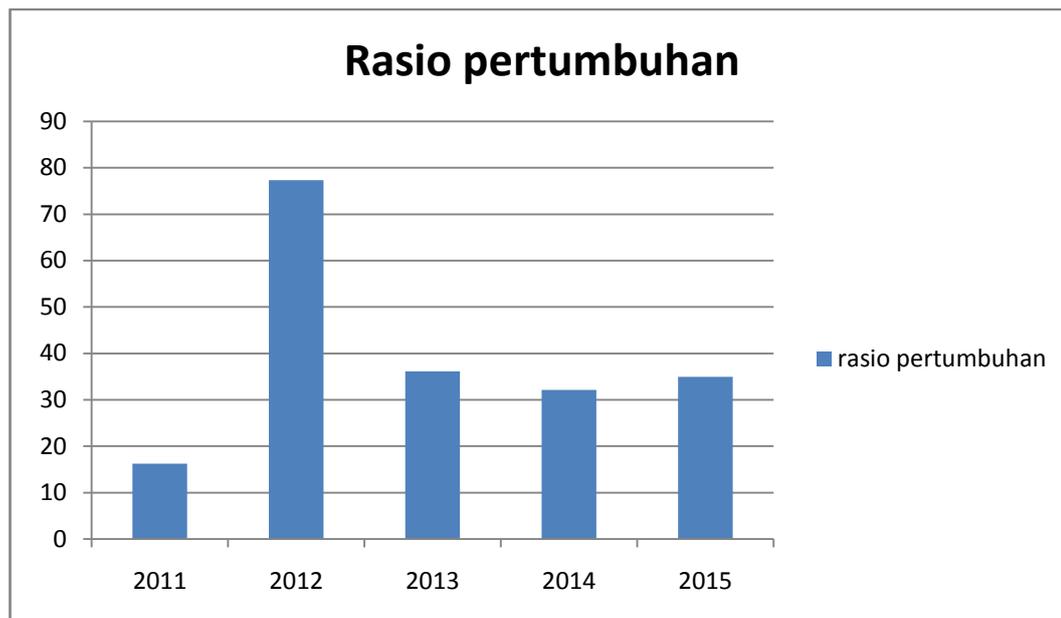
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan rneningkatkan keberhasilan yang dicapai dan periode ke periode berikutnya (Halim,2012 dalam Pramono,2014:26|). Rasio pertumbuhan dikatakan baik. jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. (Halim, 2013).

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV-3**  
**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Badan**  
**Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun**  
**2011-2015**

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2011	Rp.2.050.890.350.987	16,25
2012	Rp.3.936.284.359.169	77,37
2013	Rp.2.241.532.091.246	36,12
2014	Rp.4.720.559.458.710	12,83
2015	Rp.4.216.712.549.621	32,14
	Rata-rata	34,94

Adapun Grafik Rasio pertumbuhan pendapatan asli daearah dapat dilihat dari gambar berikut ini :



## B. Pembahasan

### 1. Kinerja Keuangan Dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tahun 2011 rasio Kemandirian Keuangan daerah berpola *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan tetapi masih berpola instruktif hal ini terjadi dikarenakan PAD mengalami peningkatan yang lebih besar jika dibandingkan bantuan Pemerintah pusat. Pada 2013 mengalami kenaikan dan menurun lagi pada tahun 2014 dan di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 21,52% dengan masih berpola hubungan Instruktif.

Dapat diketahui secara keseluruhan secara rata-rata ditahun 2011-2015 masuk didalam kriteria rendah sekali dan berpola instruktif, yang berarti bahwa peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah. Sehingga dikatakan belum mampu mandiri. Dimana dengan rata-rata  $16,80% < 25%$ . Dikarenakan rasio masih dibawah 25% maka perlu

mempertahankan potensi-potensi rill PAD yang telah dicapai dan pengelolaan belanja yang tepat.

Berdasarkan hasil analisis pemerintah pusat semakin meningkat dan jauh lebih besar dari hasil pendapatan daerah. Ini masih mengindikasikan bahwa masih ada tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

## **2. Kinerja Keuangan dinilai dari Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2011 rasio efektifitas kurang efektif dikarenakan masih mengalami penurunan. Dan tahun 2012-2013 terus menurun sehingga masuk ke dalam criteria tidak efektif, tetapi masuk ditahun 2015 cenderung cukup efektif karena meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari tahun 2011-2015 realisasi Pendapatan asli daerah selalu lebih rendah dibandingkan yang di anggarkan dan belum mencapai I atau 100%. Dan semakin tidak mencapai target yang diharapkan (Halim,2012).

Kinerja keuangan jika dilihat dari rasio efektifitas Pendapatan asli daerah secara rata-rata menggambarkan pemda kurang efektif dalam mengoptimalkan pencapaian target-targetnya dengan potensi rill yang sudah ditetapkan, rata-rata rasio efektifitas sebesar dalam kisaran 75%-89% dari criteria rasio efektifitas menurut teori mahmudi(2007). Dalam meningkatkan PAD tidak lah mudah karena dibutuhkan kesadaran masyarakat yang harus ikut andil dalam menjalankan program yang diberi pemerintah. Agar sesuai dengan target yang diinginkan pemerintahan.

### **3. Kinerja Keuangan dinilai dari Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2011 Pertumbuhan asli daerah dikatakan rendah, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang menggambarkan kinerja membaik. Namun pada tahun 2013 menurun kembali dan semakin turun di tahun berikutnya yaitu 2014, akan tetapi kembali naik di tahun 2015.

Pertumbuhan PAD dari tahun 2011-2015 bernilai positif namun cenderung mengalami penurunan. Yang mana menurut (Halim,2004) Kinerja pendapatan asli daerah dinilai baik apabila pertumbuhan bernilai positif dan kecenderungan (trend) meningkat. Dan begitu juga sebaliknya.

Di karenakan terjadinya penurunan Pertumbuhan pendapatan asli daerah perlu meningkatkan realisasi PAD dan memantau kembali potensi rill PAD. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan realisasi agar otonomi daerah lebih tinggi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masuk dalam criteria rendah sekali karena masih dibawah 25%. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar %, rasio tersebut menunjukkan pola instruktif yaitu pola yang peranan pemerintahannya lebih dominan dibandingkan pada kemandirian daerahnya. Mengingat tingkat kemandirian daerah masih dibawah 25%, sehingga daerah yang bersangkutan kurang mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dan belum dikatakan mandiri berdasarkan Kepmendagri 690.900.327.
2. Kinerja Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah jika dilihat dari analisis rasio efektifitas Pendapatan asli Daerah (PAD) dari tahun 2011-2014 menggambarkan bahwa kinerja keuangannya kurang efektif dalam mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan target-target potensi rill daerah yang sudah ditetapkan, rata-rata rasio efektifitas berkisar  $80% < 100%$  dari criteria efektifitas.
3. Kinerja Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah jika dilihat dari Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai kurang optimal dikarenakan rasio pada pertumbuhan pendapatan asli daerah yang

positif namun cenderung mengalami penurunan atau tidak stabil dari tahun ke tahun.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan penulis :

1. Hendaknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat terus mempertahankan efisiensi yang sudah baik. Dalam meningkatkan efektifitas Pendapatan Asli Daerah perlu terus meningkatkan SDM yang kompeten, system pengendalian internal yang tepat, insfratuktur yang mendukung, prosedur yang lebih sederhana dan peraturan yang lebih jelas dalam pemungutan Pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pencapaian target juga perlu kesadaran masyarakat untuk taat dan berpartisipasi dalam pembayaran pajak maupun retribusi sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Dan dapat juga dilakukan dengan memperbaiki sistem perpajakan dalam hal pemerintahan. Serta mengoptimalkan BUMD dan peranan investasi swasta di harapkan dapat memacu pertumbuhan Pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio-rasio yang lebih banyak lagi terkait dengan Pendapatan Asli Daerah sehingga nantinya dapat hasil penelitian yang lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Astriana NabilaMuhibtari. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Deddi Nordiawan. Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ihyaul Ulum. (2012). *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Joko Pramono. (2011). *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya*. STIE AMA Salatiga (<http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/970>).diakses pada tanggal 21 Desember 2015
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurlia Hafni. (2015). *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2005/58tahun2005PP.HTM>).dikses pada tanggal 21 Desember 2015.
- Sri wahyuni Darlis. (2015). *Analisis Kemandirian daerah, Efektivitas, Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta